

## Evaluasi Kebijakan dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Indonesia

**Amar Syaifullah**

Universitas Ahmad Dahlan

[amar1800331017@webmail.uad.ac.id](mailto:amar1800331017@webmail.uad.ac.id)

**Farid Setiawan**

Universitas Ahmad Dahlan

[farid.setiawan@pai.uad.ac.id](mailto:farid.setiawan@pai.uad.ac.id)

**Sendi Nurtanti**

Universitas Ahmad Dahlan

[sendi2111331009@webmail.uad.ac.id](mailto:sendi2111331009@webmail.uad.ac.id)

**Avivah Rahma Dini**

Universitas Ahmad Dahlan

[avivah2111331014@webmail.uad.ac.id](mailto:avivah2111331014@webmail.uad.ac.id)

Alamat: Jalan Kolektor Ring Road Selatan, Tamanan Banguntapan  
Bantul Yogyakarta 55166

**Abstrak.** Peningkatan kualitas sumber daya manusia sangat diperlukan dalam proses penegakan sektor pendidikan di era globalisasi. Guru merupakan komponen sistem pendidikan yang menentukan letak keberhasilan suatu pendidikan. Serendah apapun kualitas sumber daya sekolah, proses kegiatan belajar mengajar akan tetap dijalankan selama ada pendidik yang mengajar dan peserta didik yang belajar, kemudian sosialisasi perlu dijalankan oleh pihak dinas pendidikan kepada seluruh sekolah yang terdiri dari kepala sekolah dan pendidik. Evaluasi kebijakan pendidikan merupakan suatu aktifitas untuk mengetahui seberapa kebijakan pendidikan sesuai dengan kriteria serta memberikan dampak nyata sesuai yang diharapkan. Tujuan penelitian ini untuk memahami dalam mengevaluasi kebijakan dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia pada jenis penelitian deskriptif kualitatif.

**Kata kunci:** pendidikan, guru, evaluasi kebijakan, kualitas.

**Abstract.** *Improving the quality of human resources is very much needed in the process of enforcing the education sector in the era of globalization. The teacher is a component of the education system that determines the location of the success of an education. As low as the quality of school resources, the process of teaching and learning activities will continue to be carried out as long as there are educators teaching and students who are learning, then socialization needs to be carried out by the education office to all schools consisting of school principals and educators. Evaluation of educational policies is an activity to find out how educational policies are in accordance with the criteria and have a real impact as expected. The purpose of this study*

*is to understand in evaluating policies in improving the quality of education in Indonesia this type of qualitative descriptive research.*

**Keywords:** *education, teachers, policy evaluation, quality.*

## **PENDAHULUAN**

Sejarah pendidikan di Indonesia telah menggambarkan kepada kita bahwa pendidikan tersebut telah mengalami perubahan yang signifikan dan pembenahan. Pada dasarnya perubahan terhadap mempengaruhi dunia hal pendidikan tersebut adalah semacam dinamika atau persoalan yang terjadi dalam dunia politik dan akhirnya melahirkan persoalan baru. Upaya perbaikan kualitas pendidikan juga secara umum dilakukan baik dengan cara-cara yang baru. Dengan hal itu lebih berfokus lebih setelah pendidikan. Permasalahan pendidikan di Indonesia tidak hanya menyangkut persoalan kualitas, kesenjangan antara daerah satu dengan daerah lainnya, juga menjadi persoalan yang cukup serius yang harus diselesaikan. Salah satu upaya untuk memecahkan masalah tersebut ialah dengan program pendidikan yang terdesentralisasi.

Pendidikan di era ini menghadapi rintangan yang harus direspon secara positif dalam upaya peningkatan mutu pendidikan dan produktivitas nasional. Faktor utama disebabkan guru menduduki posisi yang sangat dekat dan sebagai faktor untuk menunjang keberhasilan kualitas pendidikan. Pada realitanya, tenaga pengajar memiliki peranan yang sangat strategis dalam menyukseskan proses pembelajaran. Sebab, tenaga pendidik merupakan unsur manusiawi yang sangat mudah dalam berhubungan langsung dengan siswa dalam proses pendidikan sehari-hari.

Guru mengambil tugas sebagai perancang, pelaksana, dan pengevaluasi pembelajaran. Guru dapat dikatakan salah satu orang yang bertanggung jawab untuk menyukseskan proses pembelajaran. Pendidikan akan berjalan dengan baik ketika dijalankan oleh guru yang profesional dan bertanggung jawab dalam proses pembelajaran. Walaupun pendidik bukan satu-satunya faktor menunjang keberhasilan kualitas pendidikan, tetapi pengejaran merupakan titik utama pendidikan dan kualifikasi, sebagai contoh kualitas diri, tenaga pengajar memberikan peran yang sangat besar pada kualitas pendidikan yang dikerjakannya.

Dalam peraturan dijelaskan tentang kualifikasi guru. Kualifikasi akademik sebagaimana pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan terakhir yang dibuktikan oleh ijazah dan sertifikat keahlian yang sesuai ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku. Tenaga kependidikan dan

pendidikan mutu sebagai pendidik dilaksanakan dengan mengacu pada standar pendidik dan tenaga kependidikan mata pelajaran dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP). Kegiatan program peningkatan mutu guru ini mengalami berbagai kesulitan, yang pertama masalah kesempatan (akses informasi dan transparansi dari dinas, yayasan, kepala sekolah) untuk mengikuti berbagai kegiatan peningkatan mutu guru seperti pendidikan, pelatihan, sertifikasi, maupun hal sejenisnya.

Banyak faktor yang menentukan keberhasilan pendidikan baik secara internal maupun eksternal. Sebagai sebuah organisasi, (Davis, 1985:152) menyebutkan keberhasilan pendidikan ditentukan oleh sistem organisasi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan lingkungan tempat pendidikan yang diselenggarakan. Di sisi lain, mutu pendidikan dapat dilihat dari efektifitas proses, input, output, dan outcome. Selain hal itu, kebijakan pendidikan sangat perlu diterapkan. Kebijakan pendidikan yang bertujuan mengatur keseluruhan dalam penyelenggaraan pendidikan menuju kondisi yang lebih efektif dan sangat penting untuk dipelajari, diteliti, dan diimplementasikan. Kebijakan pendidikan meliputi ketetapan, peraturan mengenai pendidikan yang telah ditetapkan dengan latar belakang yang diawali perumusan, penerapan, dan diakhiri evaluasi.

Tujuan penelitian ini adalah memberi pemahaman bahwa kebijakan pendidikan sangat penting dalam keberhasilan pendidikan. Penelitian kebijakan menggambarkan berbagai rekomendasi kebijakan yang dibutuhkan dan maksimal dalam memecahkan masalah.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini kami menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan variabel mandiri tanpa membuat perbandingan dengan variabel lainnya (Sugiyono, 2005:6). Penelitian deskriptif bermaksud memberikan penjelasan dengan gejala sosial yang sedang terjadi atau fenomena sosial yang membahas permasalahan penelitian. Sedangkan pendekatan yang kami gunakan ialah pendekatan kualitatif. Pendekatan tersebut digunakan untuk memperoleh penjelasan atau pemahaman yang lebih dalam mengenai penelitian yang sedang di kaji. penelitian ini juga menggunakan studi literature, literature yang kami gunakan ialah referensi dari beberapa sumber buku, dan jurnal.

## **PEMBAHASAN**

Evaluasi kebijakan pendidikan merupakan suatu serangkaian aktivitas untuk mengetahui suatu kebijakan pendidikan yang sudah sesuai dengan beberapa kriteria yang telah ditentukan sebelumnya dan dapat memberikan dampak nyata terhadap khalayak sesuai dengan yang diinginkan. Prosesnya dilakukan dalam penerapan analisis kebijakan pendidikan, agar diketahui apakah kebijakan pendidikan tersebut dapat terlaksana dengan baik atau tidak, apa perlu perubahan atau perbaikan. Sekaligus dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan atas kebijakan pendidikan tersebut diimplementasikan. Tidak kalah pentingnya juga, kita bisa mengetahui dampak yang ditimbulkan dari kebijakan pendidikan itu, memberikan manfaat atau menimbulkan kerugian, kegaduhan dan lainnya. Dalam tahapan manajemen, kegiatan evaluasi merupakan tahap akhir dari sebuah proses pembuatan kebijakan yang dapat menghasilkan masukan untuk dapat menyempurnakan kebijakan pendidikan tersebut.

Analisis kebijakan pendidikan yang ideal tentu memiliki ruang penilaian, mengenai apa yang sudah terjadi sebagai akibat pilihan dan implementasi kebijakan pendidikan tersebut. Jika dipandang perlu, ada perubahan terhadap kebijakan pendidikan, maka mesti dilakukan. Mengukur keberhasilan kebijakan pendidikan, merupakan salah satu instrumen penting dalam kegiatan evaluasi kebijakan pendidikan guna mengukur nilai atau manfaat dari hasil kebijakan pendidikan tersebut. Sekaligus untuk mengetahui sejauh mana suatu kebijakan pendidikan telah terlaksana atau belum terlaksana dan berhasil atau gagal sesuai dengan yang diharapkan atau tidak.<sup>1</sup>

Kebijakan pendidikan menjadi bagian dari kebijakan publik tidak bisa dilepas begitu saja, harus diikuti dengan kegiatan evaluasi. Proses evaluasi kebijakan pendidikan dilakukan untuk menilai keefektifan dan bentuk pertanggungjawaban penyelenggara pendidikan kepada publik dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan guna mengukur tingkat kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Untuk itu evaluasi kebijakan pendidikan bias menjadi alat untuk mengumpulkan dan mengelola informasi mengenai program atau pelayanan pendidikan, guna menentukan rekomendasi bagi perbaikan yang diperlukan agar implementasi kebijakan pendidikan berjalan efektif sesuai dengan kriteria yang diterapkan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Supandi, Ahmad Sanusi, (1988), *Kebijaksanaan dan Keputusan Pendidikan*

<sup>2</sup> Hasbullah. (2007), *Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*.

Pada umumnya evaluasi kebijakan pendidikan merupakan proses atau kegiatan dilakukan secara berurutan, dan menjadi tahapan akhir dalam proses analisis kebijakan.<sup>3</sup> Namun demikian, ada sebagian ahli mengatakan evaluasi kebijakan pendidikan bukan merupakan tahapan akhir dari proses kebijakan, bias dilakukan ditengah proses analisis, dengan pertimbangan program kebijakan itu mengarah pada kegagalan atau kurang sesuai dengan harapan yang diinginkan. Karena, seringkali terjadi, kebijakan gagal meraih maksud atau tujuan yang telah ditetapkan.

Dari berbagai uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan pendidikan merupakan suatu rangkaian proses untuk menilai dan mengukur seberapa jauh suatu kebijakan pendidikan membuahkan hasil dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan dan target (aspek efektivitas kebijakan=hasil;tujuan) atau perbandingan input dengan output sebagai aspek efisiensi dari kebijakan yang telah ditetapkan. Adapun aspek-aspek yang sering di evaluasi kebijakan pendidikan, antara lain 1) proses pembuatan kebijakan, 2) konsekuensi dan dampak kebijakan serta efektivitas dampak kebijakan.

Evaluasi kebijakan bisa ditujukan untuk melihat sebab-sebab yang turut serta menyebabkan kegagalan suatu kebijakan, atau untuk mengetahui kebijakan pendidikan dijalankan dan meraih manfaat yang diinginkan. Dalam bahasa sederhana, evaluasi kebijakan pendidikan untuk menilai “manfaat” dari kebijakan pendidikan yang diterapkan. Atas dasar itulah, evaluasi kebijakan pendidikan bisa diarahkan pada tiga komponen; 1) administratif, yaitu mengukur prosedur kebijakan pendidikan secara administratif, biasanya lebih pada aspek finansial; 2) yudisial; yaitu mengukur objek-objek hukum, yang mungkin di langgar atau tidak di langgar; 3) politik, yaitu mengukur pertimbangan politik dari kebijakan pendidikan itu.<sup>4</sup> Hal senada diungkapkan, evaluasi kebijakan pendidikan bisa dibedakan dalam dua tugas yang berbeda, 1) menentukan konsekuensi yang ditimbulkan dari kebijakan pendidikan dengan cara menggambarkan dampaknya, 2) untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standard atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>5</sup> Hal senada dijelaskan menyebutkan bahwa evaluasi kebijakan memiliki beberapa tujuan: a) menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan, dimana melalui evaluasi kebijakan, dapat diketahui tingkat derajat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan; b) mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan.<sup>6</sup>

<sup>3</sup> Islamy, Irfan M., (2003) *Prinsip-prinsip perumusan kebijakan Negara* Jakarta

<sup>4</sup> Putra, Nusa dan Hendarmawan. (2012), *Metodologi Penelitian Kebijakan*. Bandung:

<sup>5</sup> Stewart Jr, J., Hedge, D., & Lester, J. P. (2007). *Public Policy: An Evolutionary Approach*.

<sup>6</sup> Subarsono, A. G. (2013), *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*.

Evaluasi kebijakan pendidikan dapat juga dimaknai sebagai usaha untuk mengetahui berapa biaya dan manfaat suatu kebijakan dengan mencermati beberapa aspek, antara lain; a) mengukur tingkatan keluaran (*outcome*) kebijakan. Salah satunya adalah mengukur kualitas pengeluaran atau *output* dari suatu kebijakan; mengukur dampak suatu kebijakan yang dilakukan pada tahap lebih lanjut, evaluasi ini ditujukan untuk melihat dampak dari kebijakan, positif maupun negatif; c) mengetahui tingkat dan bentuk penyimpangan jika terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target; d) bahan masukan (*input*) untuk kebijakan yang akan datang.<sup>7</sup>

Pemahaman lebih luas dan mendalam tentang tujuan evaluasi kebijakan pendidikan, antara lain mengukur 1) apakah pengaruh program terhadap masyarakat, misalnya kebijakan bantuan operasional sekolah (BOS), pendidikan gratis, atau intervensi sosial (*social intervention*) untuk menyelesaikan masalah situasi, keadaan yang dihadapi masyarakat, 2) apakah program kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kebijakan, 3) apakah pelaksanaan program sesuai dengan standar, misalnya program BOS mempunyai standar besarnya bantuan yang berbeda untuk setiap siswa Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Apakah penggunaan bias dipertanggungjawabkannya, sehingga benar-benar semua standar sudah dipenuhi dalam melaksanakan program tersebut, 4) mengidentifikasi dan menemukan, dimensi mana program dari kebijakan yang jalan dan sebaliknya tidak jalan, 5) pengembangan staf pelaksana program pendidikan, apakah staf mempunyai keterampilan dan kompetensi untuk bekerja?, pelatihan apa yang segera dilakukan, apakah para staf perlu menerima supervisi dan koreksi atas kelemahannya, 6) memenuhi ketentuan Undang-undang dan produk peraturan lainnya.<sup>8</sup> Melengkapi uraian di atas, dapat ditambahkan beberapa tujuan evaluasi kebijakan pendidikan adalah sebagai bahan masukan (*input*) untuk kebijakan yang akan datang agar dihasilkan kebijakan pendidikan yang lebih baik.<sup>9</sup>

Manfaat evaluasi kebijakan pendidikan, dapat diklasifikasikan menjadi dua dimensi, internal dan eksternal. Adapun dimensi internal, menyangkut pihak-pihak yang terlibat langsung dalam persiapan atau implementasi kebijakan, manfaat yang didapatkan antara lain, 1) mengetahui keberhasilan suatu kebijakan yang dilakukan, agar diperoleh informasi yang objektif, apakah

---

<sup>7</sup> Kawengian, D. D., & Rares, J. J. (2015). Evaluasi Kebijakan Pencegahan Dan Pemberantasan Perdagangan Manusia (Trafficking) Terutama Perempuan Dan Anak Di Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara.

<sup>8</sup> Subarsono, A. G. (2013), *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*.

<sup>9</sup> Wirawan, (2011), *Evaluasi (Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi)*. Jakarta

kebijakan sukses atau sebaliknya, 2) mengetahui efektivitas kebijakan dengan penilaian apakah kebijakan itu sudah mencapai tujuannya atau tidak, 3) menghindari pengulangan kesalahan (guarantee to non-recurrence). Informasi dari evaluasi kebijakan yang memadai akan memberikan rambu-rambu agar tidak terulang kesalahan yang sama pada implementasi atau kebijakan yang lain pada masa-masa yang akan datang.<sup>10</sup>

Alasan yang bersifat eksternal, terkait dengan pihak-pihak yang tidak terlibat langsung dalam persiapan, maupun implementasi kebijakan. Namun mereka dapat menikmati manfaat evaluasi kebijakan pendidikan itu antara; 1) untuk memenuhi prinsip akuntabilitas publik, dimana penilaian terhadap kinerja kebijakan yang telah diambil merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pengambilan kebijakan kepada publik, baik yang terkait langsung maupun tidak, 2) untuk mensosialisasikan manfaat sebuah kebijakan, khususnya pada kelompok sasaran dan penerima secara terukur. Evaluasi kebijakan pendidikan memberikan manfaat maksimal, ada beberapa hal baik yang perlu diperhatikan; 1) Goals/values, 2) efficiency, 3) equity/equality, 4) security, 5) liberty/ freedom, 6) practical considerations, 7) effectiveness, 8) political feasibility, 9) social acceptability, 10) administrative feasibility.<sup>11</sup>

Kriteria evaluasi program kebijakan pendidikan paling tidak memenuhi beberapa unsur, antara lain; 1) relevansi, evaluasi harus memberi informasi yang relevan dengan kebutuhan pengambil keputusan dan kebijakan yang lain dan harus mampu menjawab pertanyaan secara benar pada waktu yang tepat, 2) signifikansi berarti evaluasi kebijakan harusnya mampu memberikan informasi yang terbaru dan penting bagi pelaku kebijakan untuk beranjak lebih mendalam dan substatif dari yang selama ini dalam pikirannya dianggap jelas dan terang, 3) Validitas disini maksudnya evaluasi harus dapat memberikan pertimbangan yang seimbang mengenai hasil-hasil nyata dari kebijakan atau program, 4) reliabilitas maksudnya evaluasi kebijakan harus berisikan bukti bahwa kesimpulan yang didapatkannya tidak didasarkan pada informasi melalui prosedur pengukuran yang tidak teliti dan tidak konsisten, 5) objektivitas maksudnya evaluasi kebijakan harus melaporkan kesimpulan dan informasi yang mendukung dan tidak bias, yaitu informasi yang membuat para evaluator dapat mencapai kesimpulan yang sama, 6) ketepatan waktu maksudnya evaluasi mesti membuat informasi tersedia pada waktu

---

<sup>10</sup> Hogwood, B. W., & Peters, B. G. (1985). *The pathology of public policy*. USA

<sup>11</sup> Shi, Yuyan, (2016), *Selecting Evaluation Criteria and Evaluating Policy*, San Diego

pengambilan keputusan harus dibuat, 7) daya guna, evaluasi harus menyediakan informasi yang dapat digunakan dan dimengerti oleh para pengambil keputusan dan actor kebijakan lainnya.<sup>12</sup>

Tentang kriteria evaluasi kebijakan pendidikan yang baik dapat memperhatikan berapa hal, antara lain; 1) efektivitas, artinya apakah hasil yang diinginkan telah tercapai, 2) kecukupan artinya seberapa hasil yang telah tercapai dapat membantu pemecahan masalah pendidikan yang di evaluasi, 3) pemerataan, apakah biaya dan manfaat layanan pendidikan itu didistribusikan merata kepada seluruh kelompok masyarakat yang berbeda, 4) responsivitas artinya hasil kebijakan pendidikan memuat preferensi atau nilai kelompok, terkait (*stakeholder*) dapat memuaskan mereka, 5) ketepatan, artinya hasil yang dicapai bermanfaat dari evaluasi pendidikan yang dilakukan.<sup>13</sup>

Model evaluasi kebijakan dalam bidang pendidikan bisa mengadopsi pendekatan yang digunakan dalam evaluasi kebijakan publik, ada beberapa model yang bisa diterapkan atau untuk mengevaluasi kebijakan pendidikan, antara lain: 1) goal oriented evaluation model yang dikembangkan Tyler. Objek dari model ini terdiri dari tujuan dari suatu program yang ditetapkan sebelum program berjalan dan evaluasi dilakukan secara berkelanjutan, 2) goal free evaluation model yang dikembangkan oleh Scriven. Model ini berlawanan dengan model pertama atau bisa dikatakan evaluasi lepas dari tujuan khusus Scriven menyakinkan model yang dikembangkannya perlu memperhatikan penampilan dari tiap langkah program.

Dalam melaksanakan berbagai model evaluasi kebijakan pendidikan di atas, ada beberapa pendekatan yang bias digunakan, antara lain: 1) evaluasi semu (*pseudo evaluation* maksudnya dalam melaksanakan evaluasi kebijakan pendidikan dapat menggunakan metode deskriptif guna mendapatkan informasi terpercaya dan valid berkenaan hasil-hasil kebijakan di bidang pendidikan, tanpa menanyakan manfaat atau nilai dari hasil kebijakan pendidikan tersebut pada individu, kelompok atau masyarakat. Asumsi yang digunakan adalah ukuran manfaat atau nilai tambah sesuatu yang bisa dibuktikan dengan sendirinya atau tidak kontroversial, 2) evaluasi formal, maksudnya pendekatan yang bisa digunakan untuk kegiatan evaluasi kebijakan pendidikan menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan berdasarkan sasaran program kebijakan yang sudah ditetapkan secara formalls oleh para aktor pembuat kebijakan pendidikan itu sendiri. Asumsinya

---

<sup>12</sup> Dunn, William N., (2003) *Analisa Kebijakan Publik*. (Peny.: Muhadjir Darwin). Yogyakarta

<sup>13</sup> Subarsono, A. G. (2013), *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*.

adalah sasaran dan target yang ditetapkan secara formal merupakan ukuran yang tepat untuk melihat manfaat atau nilai dari program dan kebijakan pendidikan, 3) evaluasi keputusan teoretis, maksudnya pendekatan evaluasi kebijakan pendidikan dapat menentukan sasaran dan tujuan yang tersembunyi dan dinyatakan oleh para stakeholder pendidikan.<sup>14</sup>

Mutu dewasa ini merupakan isu penting yang dibicarakan hampir dalam setiap sektor kehidupan, dikalangan bisnis, pemerintah, sistem pendidikan, dan sektor lainnya. Dalam kamus besar bahasa indonesia, mutu adalah ukuran baik buruk suatu benda, kadar, taraf, derajat (kepandaian, kecerdasan dan sebagainya), kualitas. Dalam pengertian lain, mutu diartikan sebagai makna derajat (tingkat) keunggulan satu produk (hasil kerja/upaya) baik berupa barang maupun jasa, baik yang *tangible* maupun *in tangible*. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa landasan dan dasar pendidikan belum benar-benar digunakan sebagaimana mestinya. Hal ini sebagai akibat belum adanya sarjana dan pakar di Indonesia yang secara khusus mendalami pemahaman.

Rendahnya mutu pendidikan tersebut dapat diperhatikan pada hasil-hasil studi internasional yang selalu mendapatkan pendidikan indonesia dalam posisi 32 dan 34 untuk sekor tes IPA dan Matematika. Mutu dalam konteks pendidikan berkaitan dengan upaya memberikan pelayanan yang optimal, dan memuaskan bagi para pemakai jasa pendidikan. Dalam proses penyelenggaraan pendidikan, aspek mutu (quality) juga akan selalu berkaitan dengan input peserta didik, proses penyelenggaraan pendidikan dengan fokus layanan peserta didik, sampai bagaimana Output lulusan yang dihasilkan. Maka dari itu, mutu dalam pendidikan dapat saja disebutkan mengutamakan pelajar atau program perbaikan sekolah yang mungkin dilakukan secara kreatif dan konstruktif.(Syafaruddin 2005) Mutu dalam pendidikan memang dititiktekan pada pelajar dan proses yang ada didalamnya. Tanpa adanya proses yang baik, maka madrasah yang bermutu juga mustahil untuk dicapai

Mutu pendidikan sering diindikasikan dengan kondisi yang baik, memenuhi syarat, dan segala komponen yang harus terdapat dalam pendidikan, komponen-komponen tersebut adalah masukan, proses, keluaran, tenaga kependidiaya, sarana. Mutu pendidikan juga merupakan salah satu faktor penentu daya saing bangsa, sehingga untuk dapat tetap bisa bertahan dalam percaturan global, maka pendidikan yang bermutu mutlak diperlukan. Peningkatan mutu pendidikan

---

<sup>14</sup> Dunn, William N., (2003) *Analisa Kebijakan Publik*. (Peny.: Muhadjir Darwin).

merupakan sarana pembangunan di bidang pendidikan nasional, dan merupakan bagian points dari upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia (menyeluruh).

Mutu pendidikan harus diupayakan untuk mencapai kemajuan yang dilandasi oleh suatu perubahan terencana menurut segala peningkatan mutu pendidikan diperoleh melalui dua strategi, yaitu: 1) peningkatan mutu pendidikan yang berorientasi akademis untuk memberi dasar minimal dalam perjalanan yang harus ditempuh untuk mencapai mutu pendidikan yang dipersyaratkan oleh tuntutan zaman, 2) peningkatan mutu pendidikan yang berorientasi pada keterampilan hidup, esensial, yang dicakupi oleh pendidikan yang berlandasan luas, nyata, dan bermakna(Moh. Fathorrohman 2012)

Lebih lanjut segala menyatakan, bahwa lembaga pendidikan dapat dikatakan bermutu, apabila prestasi sekolah khususnya, prestasi peserta didik, menunjukkan pencapaian yang tinggi dalam; 1) prestasi akademik, yaitu nilai raport dan nilai kelulusan memenuhi standart yang ditentukan, 2). Memiliki nilai-nilai kejujuran, ketaqwaan, kesopanan, dan mampu mengapresiasi nilai-nilai budaya, dan 3). Memiliki tanggung jawab yang tinggi, dan kemampuan yang diwujudkan dalam bentuk keterampilan, sesuai dengan standart ilmu yang diterimanya di sekolah. Pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang dapat menghasilkan peserta didik yang memiliki kemampuan, wawasan, dan keterampilan sesuai dengan standart yang ditetapkan, sehingga memiliki peluang yang cukup untuk berkompetensi di pasar kerja maupun dengan tidak mengesampingkan aspek-aspek moral dalam kehidupannya.

Terdapat dua faktor yang dapat menjelaskan kenapa upaya perbaikan mutu pendidikan selama ini kurang atau tidak berhasil. Pertama, strategi pembangunan selama ini lebih bersifat input *oriented*(Ma'arif 2016). Strategi yang demikian lebih bersandar kepada asumsi bahwa bilamana semua input pendidikan telah dipenuhi, seperti penyediaan buku-buku (materi ajar) dan alat belajar. lainnya, penyediaan sarana pendidikan, pelatihan guru dan tenaga kependidikan lainnya, maka secara otomatis lembaga pendidikan (pendidikan tinggi islam) akan dapat menghasilkan outpout (keluaran) yang bermutu sebagaimana yang diharapkan. Kedua, pengelolaan selama ini masih bersifat marco-oriented, diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat. Akibatnya banyak faktor yang diproyeksikan di tingkat makro (pusat) tidak terjadi atau tidak berjalan sebagaimana mestinya ditingkat mikro (sekolah). Dengan kata lain, bahwa

kompleksitasnya cakupan permasalahan pendidikan, seringkali tidak dapat terpikirkan secara utuh dan akurat oleh birokrasi pusat(Umaidi 1999).

Abdul Rahman Sholeh menyatakan bahwa ada tiga faktor yang menyebabkan mutu pendidikan mutu pendidikan menurun dan mengalami perkembangan yang tidak merata. Pertama, kebijakan penyelenggaraan pendidikan nasional yang menggunakan pendekatan educational production function atau input-output yang dilaksanakan secara tidak konsekuen. Kedua, penyelenggara pendidikan nasional dilakukan secara birokratis-sentralsistik, sehingga menempatkan sekolah madrasah sebagai penyelenggara pendidikan sangat tergantung pada keputusan birokrasi yang panjang dan kadang-kadang kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kondisi sekolah (Madrasah) setempat. Ketiga, peran serta masyarakat khususnya orang tua peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini pada umumnya lebih bersifat dukungan Input (dana), bukan pada proses pendidikan (pengambilan keputusan, monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas)(Shaleh 2004).

Sekolah dan sistem sekolah sebagai suatu lembaga social dan pendidikan dipilih dan ditempatkan di antara system kelembagaan yang telah ada. Fungsi utama sekolah pada awalnya adalah pengajaran, setidak-tidaknya dalam terminology, namun dalam perkembangannya sekolah berfungsi majemuk dengan pendidikan sebagai intinya. Persoalan jumlah dan siapa yang perlu memperoleh pendidikan kiranya cukup jelas, yaitu semua rakyat pembentuk bangsa kita, sedangkan yang perlu dipikirkan dan di usahakan adalah kualifikasi dan mutu atau mutu, kecerdasannya, dan jalan serta cara mencapainya merupakan implikasi pesan utama cita-cita yang diletakkan oleh bapak-bapak pendiri Republik Indonesia dan pengisian pesan tersebut perlu dicari, dikaji, dan terus dikembangkan(Suyata 1998). Bukan saja bagi para professional, juga bagi masyarakat luas pun terdapat suatu gerakan yang menginginkan adanya perubahan sekarang juga dalam hal usaha peningkatan mutu atau mutu pendidikan.

Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing di masa depan diharapkan dapat memberikan wetak bagi perwujudan eksistensi manusia dan interaksinya. sehingga dapathidup bersama dalam keragaman sosial dan budaya. Selain itu, upaya peningkatan mutu danrelevansi dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat serta daya saing bangsa. Mutu pendidikan juga dilihat dari meningkatnya penghayatan dan pengamalan nilai-nilai humanisme yang meliputi keteguhan iman dan takwa serta berakhlak mulia, etika, wawasan kebangsaan, kepribadian tangguh, ekspresi

estetika. Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan diukur dari pencapaian kecakapan akademik dan nonakademik yang lebih tinggi yang memungkinkan lulusan dapat proaktif terhadap perubahan masyarakat dalam berbagai bidang baik di tingkat lokal maupun global

Kebijakan peningkatan mutu pendidikan diarahkan pada pencapaian mutu pendidikan yang semakin meningkat yang mengacu pada standar nasional pendidikan (SNP). SNP meliputi berbagai komponen yang terkait dengan mutu pendidikan mencakup standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Pemerintah mendorong dan membimbing satuan-satuan dan program (studi) pendidikan untuk mencapai standar yang diamanatkan oleh SNP. Standar-standar tersebut digunakan juga sebagai dasar untuk melakukan penilaian terhadap kinerja satuan dan program pendidikan, mulai dari PAUD, Dikdas, pendidikan menengah (Dikmen), PNF, sampai dengan pendidikan tinggi (Dikti)(Anon 2007)

Dalam rangka peningkatan mutu atau mutu pendidikan, telah dilakukan berbagai kegiatan diantaranya adalah:

- a. Pengembangan kurikulum termasuk cara penyajian pelajaran dan sistem studi pada umumnya.
- b. Pengadaan buku-buku pelajaran pokok untuk murid serta buku pedoman guru sekolah dasar dan sekolah-sekolah lanjutan, buku-buku pelajaran kejuruan dan tehnik untuk sekolah-sekolah yang memerlukannya dan buku-buku perpustakaan dalam berbagai bidang studi pada pendidikan tinggi.
- c. Pengadaan alat-alat peraga dan alat-alat pendidikan lainnya pada sekolah dasar (SD), TK, dan SLB, laboratorium IPA dan SMP & SMA, fasilitas dan perlengkapan latihan dan praktik pada sekolah-sekolah kejuruan dan tehnik serta laboratorium untuk berbagai bidang ilmu pendidikan untuk Perguruan Tinggi
- d. Penataran guru-guru dan dosen.
- e. Pengadaan buku bacaan yang sehat dan bermutu melalui perpustakaan sekolah(Soeyarno 1993)

Peningkatan mutu pendidikan semakin diarahkan pada perluasan inovasi pembelajaran baik pada pendidikan formal maupun nonformal dalam rangka mewujudkan proses yang efisien, menyenangkan dan mencerdaskan sesuai tingkat usia, kematangan, serta tingkat perkembangan

peserta didik. Pengembangan proses pembelajaran pada PAUD serta kelaskelas rendah sekolah dasar lebih memperhatikan prinsip perlindungan dan penghargaan terhadap hak-hak anak dengan lebih menekankan pada upaya pengembangan kecerdasan emosional,

sosial, dan spiritual dengan prinsip bermain sambil belajar. Peningkatan mutu pendidikan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi semakin memperhatikan pengembangan kecerdasan intelektual dalam rangka memacu penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di samping memperkokoh kecerdasan emosional, sosial, dan spritual peserta didik(Indana 2018)

Upaya peningkatan mutu dan relevansi pendidikan secara berkelanjutan akan dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan secara terpadu yang pengelolaannya dikoordinasikan secara terpusat. Dalam pelaksanaannya koordinasi tersebut didelegasikan kepada gubernur atau aparat vertikal yang berkedudukan di provinsi(Indana 2018).

Manajemen sumber daya manusia sangat penting dalam meningkatkan kualitas mutu pendidikan. Hal ini didasarkan dalam suatu lembaga pendidikan bisa berkembang dan maju dengan dukungan dari sumber daya manusia didalamnya. Sehingga setiap lembaga pendidikan yang ingin maju dan berkembang harus memperhatikan sumber daya manusianya dan mengelolanya dengan baik dan terwujud pendidikan yang berkualitas dan bermutu. Peningkatan mutu pendidikan sangat ditentukan oleh pimpinan lembaga pendidikan dalam mengelola sumber daya manusianya dalam hal ini tenaga pendidik dan kependidikan. Dalam manajemen sumber daya manusia, pimpinan perguruan tinggi menjadi kunci dalam peningkatan mutu pendidikan. Pimpinan perguruan tinggi dituntut untuk selalu mengembangkan sumber daya manusia untuk menciptakan pendidikan yang bermutu.

Pentingnya manajemen sumber daya manusia dalam meningkatkan kualitas pendidikan, didasari oleh (Zulfa 2013)

- a. Sumber daya manusia atau tenaga kerja merupakan faktor sentral dalam pendidikan, mengingat perannya yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan.
- b. Dengan pemanfaatan sumber daya manusia oleh manajer dalam suatu organisasi secara efektif dan efisien, akan mengoptimalkan pencapaian tujuan organisasi dan pemanfaatan sumber daya manusia dimulai dari melakukan perencanaan yang tepat, pengorganisasian yang mantap, penyusunan staf yang tepat dan profesional,

- pengarahan dan pengawasan yang terkendali dengan baik akan menjamin berfungsinya proses manajerial.
- c. Manajemen sumber daya manusia termasuk salah satu bagian dari manajemen pendidikan secara keseluruhan, dan manajemen sumber daya manusia menduduki tempat yang sangat penting. Dikatakan demikian karena sumber daya manusia dalam hal ini tenaga pendidik adalah faktor sentral dalam pendidikan.
  - d. Sumber daya manusia merupakan faktor penting bagi keberhasilan suatu lembaga pendidikan, untuk itu sumberdaya manusia perlu dikelola dengan sebaik-baiknya melalui manajemen sumber daya manusia. Karena melalui usaha-usaha dan kreativitas sumber daya manusia, organisasi dapat menghasilkan suatu produk dan jasa yang berkualitas.

## **KESIMPULAN**

Evaluasi kebijakan pendidikan merupakan suatu serangkaian aktivitas untuk mengetahui suatu kebijakan pendidikan yang sudah sesuai dengan beberapa kriteria yang telah ditentukan sebelumnya dan dapat memberikan dampak nyata terhadap khalayak sesuai dengan yang diinginkan. Evaluasi kebijakan bisa ditujukan untuk melihat sebab-sebab yang turut serta menyebabkan kegagalan suatu kebijakan, atau untuk mengetahui kebijakan pendidikan dijalankan dan meraih manfaat yang diinginkan.

Dalam bahasa sederhana, evaluasi kebijakan pendidikan untuk menilai “manfaat” dari kebijakan pendidikan yang diterapkan. Kebijakan peningkatan mutu pendidikan diarahkan pada pencapaian mutu pendidikan yang semakin meningkat yang mengacu pada standar nasional pendidikan (SNP). SNP meliputi berbagai komponen yang terkait dengan mutu pendidikan mencakup standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Pemerintah mendorong dan membimbing satuan-satuan dan program (studi) pendidikan untuk mencapai standar yang diamanatkan oleh SNP. Standar-standar tersebut digunakan juga sebagai dasar untuk melakukan penilaian terhadap kinerja satuan dan program pendidikan, mulai dari PAUD, Dikdas, pendidikan menengah (Dikmen), PNF, sampai dengan pendidikan tinggi. Upaya peningkatan mutu dan relevansi pendidikan secara berkelanjutan akan

dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan secara terpadu yang pengelolaannya dikoordinasikan secara terpusat.

Dalam pelaksanaannya koordinasi tersebut didelegasikan kepada gubernur atau aparat vertikal yang berkedudukan di provinsi. Peningkatan mutu pendidikan sangat ditentukan oleh pimpinan lembaga pendidikan dalam mengelola sumber daya manusianya dalam hal ini tenaga pendidik dan kependidikan. Dalam manajemen sumber daya manusia, pimpinan perguruan tinggi menjadi kunci dalam peningkatan mutu pendidikan. Pimpinan perguruan tinggi dituntut untuk selalu mengembangkan sumber daya manusia untuk menciptakan pendidikan yang bermutu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, William N., (2003) *Analisa Kebijakan Publik*. (Peny.: Muhadjir Darwin). Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hasbullah. (2007), *Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Hogwood, B. W., & Peters, B. G. (1985). *The pathology of public policy*. USA: Oxford University Press.
- Islamy, Irfan M., (2003) *Prinsip-prinsip perumusan kebijakan Negara* Jakarta: Bumi Aksara.
- Kawengian, D. D., & Rares, J. J. (2015). *Evaluasi Kebijakan Pencegahan Dan Pemberantasan Perdagangan Manusia (Trafficking) Terutama Perempuan Dan Anak Di Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara*. JURNAL ACTA DIURNA, 4(5).
- Putra, Nusa dan Hendarmawan. (2012), *Metodologi Penelitian Kebijakan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Shi, Yuyan, (2016), *Selecting Evaluation Criteria and Evaluating Policy*, San Diego; University of California.
- Stewart Jr, J., Hedge, D., & Lester, J. P. (2007). *Public Policy: An Evolutionary Approach*. Nelson Education.

- Subarsono, A. G. (2013), *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Supandi, Ahmad Sanusi, (1988), *Kebijaksanaan dan Keputusan Pendidikan*, Jakarta: P2LPTK.
- Wirawan, (2011), *Evaluasi (Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Anon. 2007. “Renstra (Rencana Strategis) departemen pendidikan nasional.”
- Indana, Nurul. 2018. “Penerapan Kurikulum Terintegrasi Dalam Mengembangkan Mutu Belajar Siswa (Studi Kasus Di Sma Darul ‘Ulum 1 Unggulan Bppt Jombang).”
- Ma’arif, Muhammad Anas. 2016. “Pendidikan Islam Dan Tantangan Modernitas”, Nidhomul Haq: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam.”
- Moh. Fathorrohman. 2012. “Implementasi Menejemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam (Peningkatan Pendidikan Lembaga Pendidikan Islam Secara Holistik, Praktik Dan Teori).”
- Shaleh, Abdul Rahman. 2004. “Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa.” .
- Soeyarno, Wasty. Soemanto. F. X. 1993. “Landasan Historis Pendidikan Islam, Usaha Nasional.”
- Suyata. 1998. “Perbaikan Mutu Pendidikan Transformasi Sekolah Dan Implikasi Kebijakan.”
- Syafaruddin. 2005. “Manajemen Mutu Terpadu dalam Pendidikan, Konsep, Strategi dan Aplikasi.” *Manajemen Mutu Terpadu dalam Pendidikan, Konsep, Strategi dan Aplikasi*.
- Umaldi. 1999. “Menejemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah; Sebuah Pendekatan Baru Dalam Pengelolaan Sekolah Untuk Meningkatkan Mutu Internet/Mbs/Artikel Pendidikan.”
- Zulfa, Marrisa. 2013. “Pentingnya MSDM Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan.”